

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETAATAN EMITEN TERHADAP ATURAN
BOARD GOVERNANCE
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**ANNISSA FITRIA FARAHAZL
NIM. C2C606017**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Annissa Fitria Farahnazl
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606017
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KETAATAN EMITEN
TERHADAP ATURAN *BOARD
GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Abdul Rohman, SE.,MSi., Akt.

Semarang, 29 September 2010

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Abdul Rohman, SE.,MSi., Akt.)
NIP : 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Annissa Fitria Farahnazl

Nomor Induk Mahasiswa : C2C606017

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KETAATAN EMITEN
TERHADAP ATURAN *BOARD
GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Oktober 2010

Tim Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rohman, SE.,MSi., Akt (.....)

2. Daljono, SE., M.Si., Akt (.....)

3. Totok Dewayanto, SE., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Annissa Fitria Farahnazl, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN EMITEN TERHADAP ATURAN *BOARD GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, September 2010

Yang Membuat Pernyataan,

Annissa Fitria Farahnazl
NIM. (C2C606017)

ABSTRACT

The phenomenon about compliance board governance is interesting topic to be examined because the issuers haven't obedient about this rules. Aim of this research was to examine the effect of asset, age of go public, type of industry toward the compliance of issuers on board governance in Indonesian Stock Exchange.

This research used 178 samples of company listed in BEI on period 2008. The measured by logistic regression with SPSS program. In collection data, this research analyzed secondary data obtained from ICMD (Indonesia Capital Market Directory) and Indonesian Stock Exchange.

Analysis result showed that : (1) Aset have effect on the compliance of issuers on board governance. (2) Age of go public have effect on the compliance of issuers on board governance. (3) Type of industry have effect on the compliance of issuers on board governance.

Keywords: Board Governance, asset, age of go public, type of industry.

ABSTRAKSI

Fenomena mengenai ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* adalah hal yang menarik untuk diteliti karena masih belum taatnya emiten terhadap aturan ini. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah asset perusahaan, umur go public dan jenis industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk: memperoleh bukti empiris tentang pengaruh besar asset, umur go public, dan jenis industri terhadap ketaatan emiten pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 178 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2008. Alat analisis menggunakan uji logistik regression dengan menggunakan program SPSS. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menganalisis data sekunder yang diperoleh dari ICMD (*Indonesia Capital Market Directory*) selama tahun 2008 dan Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menyatakan bahwa : (1) Besarnya asset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*. (2) Umur go public mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*. (3) Jenis industri mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Kata Kunci : *Board Governance*, besar asset, umur go public, jenis industri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**FAKTOR – FAKTOR YANG MENPENGARUHI KETAATAN EMITEN TEHADAP ATURAN *BOARD GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan doa dari pihak lain. Oleh sebab itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing, yang dengan ikhlas dan sabar memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Anis Chariri, M.Com., Ph.D, Akt selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dari awal kuliah sampai akhir.
4. Para Dosen Program S-1 Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

5. Para Pengelola Program S-1 Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
6. Para Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
7. Bapak dan Ibuku tercinta (Sudomo, S.H dan Meining Hariyati, S.Sos) yang tidak pernah usai memberikan cinta, kasih sayang, doa, nasehat serta semangat kepada putrimu ini.
8. Kedua adikku tersayang (Bilawal Aulia Annas dan Salma Shabrina Al Kautsar) yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
9. Wahyu Adhi Nugroho, terimakasih atas kesabaran, kasih sayang, doa, nasehat serta semangat yang luar biasa. Kau adalah semangat, motivator, dan inspirasi dalam hidupku.
10. Semua keluarga-keluargaku yang memberikan dorongan dan nasehatnya.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Frisca Wahyu Purnama, Desi Kartikasari, Festy Vita S., dan Erma Yunita Islami yang selalu setia mendengarkan semua cerita-ceritaku dan keluhanku. Maaf kalo aku sering membuat kalian jengkel dan merepotkan. Terimakasih buat dorongan dan semangatnya.
12. Teman-temanku Nur Indah Rahmawati, Isnaeni Endah yang meberiku semagat, dorongan, mendengarkan keluhanku serta mau mengajariku.
13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006 yang selalu kompak.
14. Teman-teman KKN Randu Gunting Periode II 2009 (Andin “mbak Panda”, Nita, Caprilia, Rathna, Bowo “dhek Panda”, Setyo, Cahyo, Gana, Fajri dan Bangkit “Simpsons”) yang selalu kompak dalam segala hal terutama makan.

15. Anak-anak BSD (Redi, Risman, Mbahe dan Harli) terimakasih atas kerjasama kalian selama bekerja.
16. Perpustakaan FE Undip dan UPT Perpustakaan Undip yang telah menyediakan materi dalam penyusunan skripsi.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung atau tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini di masa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2010

Annissa Fitria Farahnazi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(QS. Al-Inssiroh: 6-8)

Dan katakanlah bekerjalah maka Tuhan dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.

(QS. Al-Tawbah:105)

Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus.

(Thomas Carlyle)

Buah karya ini kupersembahkan untuk:

- *Ayah dan Ibu tercinta*
- *Kedua adikku tersayang*
- *Orang terdekatku*
- *Seluruh sahabat-sahabatku*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| ABSTRAKSI..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 10 |
| 2.1.1 Teori Agensi..... | 10 |
| 2.1.2 Ketaatan Terhadap Board Governance..... | 13 |
| 2.1.2.1 Besarnya aset perusahaan..... | 14 |
| 2.1.2.2 Umur perusahaan..... | 14 |
| 2.1.2.3 Jenis Industri..... | 15 |
| 2.1.3 Definisi <i>Corporate Governance</i> | 15 |
| 2.1.4 Elemen-Elemen <i>Corporate Governance</i> | 18 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 2.1.5 | Cakupan <i>Board Governance</i> | 26 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 27 |
| 2.3 | Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| 2.4 | Pengembangan Hipotesis | 33 |
| 2.4.1 | Pengaruh Besarnya Aset dengan Ketaatan Emiten terhadap Aturan <i>Board Governance</i> | 34 |
| 2.4.2 | Pengaruh Umur <i>Go Public</i> dengan Ketaatan Emiten terhadap Aturan <i>Board Governance</i> | 35 |
| 2.4.3 | Pengaruh Jenis Industri dengan Ketaatan Emiten terhadap Aturan <i>Board Governance</i> | 36 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1. | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..... | 37 |
| 3.1.1 | Variabel Dependen..... | 37 |
| 3.1.2 | Variabel Independen..... | 37 |
| 3.2. | Populasi dan Sampel..... | 41 |
| 3.2.1 | Populasi..... | 41 |
| 3.2.2 | Penentuan Sampel..... | 41 |
| 3.3. | Jenis dan Sumber Data..... | 42 |
| 3.4. | Metode Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.5. | Metode Analisis | 43 |
| 3.5.1 | Statistik Deskriptif..... | 44 |
| 3.5.2 | <i>Logistic Regression</i> | 44 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | 47 |
| 4.1. | Gambaran Umum Obyek Penelitian..... | 47 |
| 4.2. | Statistik Deskriptif..... | 52 |
| 4.3. | Pengujian Model Fit..... | 55 |
| 4.4. | Pengujian Hipotesis..... | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 4.5. Pembahasan..... | 61 |
| 4.5.1 Besarnya asset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan <i>board governance</i> | 61 |
| 4.5.2 Umur <i>go public</i> perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan <i>board governance</i> | 62 |
| 4.5.3 Jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan <i>board governance</i> | 63 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 64 |
| 5.2. Keterbatasan Penelitian | 64 |
| 5.3. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 27 |
| Tabel 3.1. Kategori Ketaatan Emiten..... | 38 |
| Tabel. 3.2. Jenis Industri..... | 40 |
| Tabel 3.3 Kriteria Sampel Penelitian | 42 |
| Tabel 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian..... | 47 |
| Tabel 4.2. Statistik Deskriptif | 52 |
| Tabel 4.3. Frekuensi (Jumlah) Perusahaan Berdasarkan Jenis Industri..... | 55 |
| Tabel 4.4. Frekuensi (Jumlah) Perusahaan Berdasarkan <i>Board Governance</i> | 55 |
| Tabel 4.5. <i>Hosmer dan Lemeshow's Goodness of Fit Test</i> | 56 |
| Tabel 4.6. <i>Omnibus test of Model Coefficients</i> | 56 |
| Tabel 4.7. Tabel Klasifikasi..... | 57 |
| Tabel 4.8 Tabel Iteration History -2 Log Likelihood..... | 58 |
| Tabel 4.9. Nagelkerke R Square..... | 58 |
| Tabel 4.10. Hasil Pengujian Hipotesis..... | 59 |
| Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis..... | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------------------------------|----------------|
| Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran..... | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Penelitian
- Lampiran 2. Deskriptif Statistik
- Lampiran 3. Frekuensi
- Lampiran 4. Logistic Regression

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi di negara Asia yang masih terasa dampaknya hingga saat ini adalah akibat buruknya tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (Kusumawati dan Riyanto, 2005). Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain yang terjadi bukan hanya faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas (Kusumawati dan Riyanto, 2005). Menurut (McKinsey Investor Opinion Survey, 1999-2000), Indonesia adalah negara paling buruk dalam penerapan *Good Corporate Governance*, oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* harus segera dilakukan agar iklim dunia usaha semakin membaik.

Respon terhadap kebutuhan pembentukan Sistem *Good Corporate Governance* pada beberapa tahun ini sangat tinggi, hal ini belajar dari pengalaman akibat banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang sangat tidak mengembirakan, di samping itu tidak efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi yang tidak saja melanda *profit*

organisation tetapi juga *non-profit organisation* tidak terkecuali institusi pemerintah (Husnan, 2001).

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat (Nasution, Marihot dan Setiawan, 2007). Untuk memenuhi tuntutan pasar, pihak regulator Indonesia, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ), berupaya memperbaiki *corporate governance* perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal itu antara lain dituangkan dalam *code for good corporate governance* dan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan atau *corporate governance*, yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/062000 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Ini menunjukkan bahwa teori mengenai *board governance* tidak terlepas dari teori mengenai *Good Corporate Governance*.

Hadirnya *good corporate governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat *good corporate governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi (Hastuti, 2005). Menurut Kusumawati dan Riyanto (2005), *good corporate governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary*

Fund sangat berkepentingan terhadap penegakan *Corporate Governance* di Negara-negara penerima dan karena mereka menganggap bahwa *Corporate Governance* merupakan bagian penting dari sistem pasar yang efisien (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Upaya pengembangan *good corporate governance* ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilih terjaga. Beberapa penelitian tentang *Good Corporate Governance* di tingkat perusahaan sebagian besar dilakukan di Amerika Serikat dan di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) (Shleifer dan Vishny, 1997). Praktik *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Praktik *good corporate governance* lebih bervariasi di negara yang mempunyai lingkungan hukum yang lebih lemah (Khomsiyah dan Rika, 2004).

Pedoman *good corporate governance* disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 2002 dengan tujuan agar pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksanaan *good corporate governance* oleh pelaku usaha di Indonesia. Apabila praktik-praktik *good corporate governance* sesuai dengan KNKCG, maka dapat membantu manajer dalam penggambaran tingkat *compliance* mereka terhadap *good corporate governance* (Kusumawati dan Riyanto, 2005). Untuk memperbaiki kerangka implementasi *good corporate governance*, kemudian muncul apa yang disebut dengan *board governance*.

Board governance adalah tata kelola dari anggota dewan atau pimpinan yang sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh direksi Bursa Efek Jakarta. Peraturan tentang *board governance* merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah sebagai pihak regulator untuk memperbaiki *corporate governance* di Indonesia, terutama pasca krisis ekonomi tahun 1997.

Ketaatan terhadap *board governance* adalah seberapa taat para emiten terhadap aturan yang ditetapkan tentang keberadaan *board governance*. Rendahnya kesadaran emiten untuk menerapkan aturan *board governance* karena aturan tersebut bersifat himbuan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak regulator (Nuryanah 2004). Fenomena ketaatan terhadap *board governance* masih jarang untuk diteliti karena masih bersifat tidak wajib pada saat periode pengamatan sampel (tahun 2008) dan tidak dikenai sanksi. Maka hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Nuryanah (2004) meneliti bahwa variabel industri mampu menerangkan tingkat responsivitas emiten dalam menerapkan aturan *board governance* berkaitan dengan struktur dan komposisi *board governance*. Variabel besar emiten berdasarkan aset dan umur *go public* emiten tidak signifikan secara statistik.

Penelitian ini penting karena isu terhadap rendahnya kesadaran mengenai ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* adalah hal yang menarik untuk

diteliti dan akan mempengaruhi penerapan *good corporate governance* di Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi ketaatan *board governance*, seperti besar aset perusahaan, umur perusahaan dan jenis industri. Alasan dipilihnya ketiga variabel tersebut adalah karena berdasarkan pada penelitian terdahulu (Augustine dan Amelinda, 2005) menyatakan bahwa ketiganya akan mempengaruhi *board governance*.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Augustine dan Amelida (2005). Di dalam penelitian Augustine dan Amelida (2005), sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2003 dengan variabel independen yang digunakan adalah besarnya aset perusahaan dan umur *go public*, sedangkan pada penelitian ini, mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 (data dengan tahun terbaru supaya data *up to date*) dan variabel independen yang digunakan adalah besarnya aset perusahaan dan umur *go public* perusahaan serta jenis industri perusahaan tersebut.

Penelitian tentang ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* perlu untuk diteliti ulang karena selain masih jarang diteliti, tetapi juga pada penelitian sebelumnya, belum terbukti secara konsisten bahwa variabel aset perusahaan, umur *go public*, dan jenis industri secara signifikan mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*. Maka dari itu akan menjadi hal yang menarik untuk meneliti ulang dengan menggunakan sampel dan periode pengamatan yang berbeda untuk menguji ulang konsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul:
**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN EMITEN
TERHADAP ATURAN *BOARD GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.**

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena mengenai ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* adalah hal yang menarik untuk diteliti karena masih belum taatnya emiten terhadap aturan ini. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah aset perusahaan, umur go public dan jenis industri. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Augustine dan Amelinda (2005) membuktikan bahwa variabel aset dan umur *go public* tidak signifikan secara statistik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuryanah (2004) berhasil membuktikan secara empiris bahwa variabel aset mempengaruhi ketaatan emiten terhadap *board governance*. Karena ketidakkonsistenan tersebut maka muncul perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah besarnya aset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan aturan *Board Governance*?
2. Apakah umur *go public* mempengaruhi ketaatan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan aturan *Board Governance*?

3. Apakah jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh besar aset terhadap ketaatan emiten pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan aturan *Board Governance*.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh umur *go public* terhadap ketaatan emiten pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan aturan *Board Governance*.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jenis industri terhadap ketaatan emiten pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat membuat efektifitas aturan *Board Governance* yang akan berdampak pada semakin baiknya tata kelola perusahaan dan kemudian bisa berdampak pada peningkatan penciptaan nilai perusahaan.

2. Kegunaan Teoritis:

Memberikan sumbangan teoritis tentang ketaatan emiten terhadap aturan *Board Governance* dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance* emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini, landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai

manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Teori keagenan modern mencoba untuk menjelaskan struktur modal perusahaan sebagai cara untuk meminimalisasi biaya yang dikaitkan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Wirjolukito (2003), perusahaan yang kepemilikan dan pengendalian manajerialnya tinggi maka biaya keagenannya rendah. Hal ini disebabkan antara pemegang saham dan manajer terdapat tujuan yang sama. Masalah keagenan muncul disebabkan adanya: (1) Informasi asimetris, (2) transfer kesejahteraan potensial yang dilakukan manajer dari pemegang obligasi kepada pemegang saham melalui penerimaan proyek berisiko tinggi yang menghasilkan return yang tinggi, (3) kesalahan menerima proyek yang memberikan nilai sekarang bersih positif dan konsumsi keuntungan yang tersisa.

Agency Theory ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan: Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik, manajemen harus diberikan insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan pengawasan tentu saja membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi (Saidi, 2004).

Sedangkan biaya agensi menurut Home dan Wachowicz (1998) dalam Saidi (2004) adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham.

Salah satu pendapat dalam teori agensi adalah siapapun yang menimbulkan biaya pengawasan, biaya yang timbul pasti merupakan tanggungan pemegang saham. Sebagai misal, pemegang obligasi, mengantisipasi biaya pengawasan, membebankan bunga yang lebih tinggi. Semakin besar peluang timbulnya pengawasan, semakin tinggi tingkat bunga, dan semakin rendah nilai perusahaan bagi pemegang saham. Biaya pengawasan berfungsi sebagai diisensif dalam penerbitan obligasi, terutama dalam jumlah yang besar. Jumlah pengawasan yang diminta oleh pemegang obligasi akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah obligasi yang beredar.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

2.1.2 Ketaatan terhadap *Board Governance*

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) berupaya memperbaiki *corporate governance* dengan mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam *code for good corporate governance* dan peraturan yang berkaitan dengan *corporate governance*, yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh direksi Bursa Efek Jakarta, untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Kep-339/BEJ/07-2001).

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan *board governance* yaitu:
(Augustine dan Amelinda, 2005)

2.1.2.1. Besarnya aset perusahaan

Perusahaan dengan aset yang semakin besar memiliki kecenderungan untuk semakin menaati peraturan *board governance* karena sebagai emiten mereka ingin memiliki citra yang baik dan cenderung menaati peraturan *board governance* (Klapper dan Love, 2002).

Aset merupakan seberapa besar aktiva yang dimiliki sebuah perusahaan. Semakin besar skala perusahaan, pada umumnya memiliki aset yang semakin besar pula dan sebaliknya. Dengan semakin besarnya aset yang dimiliki maka kredibilitas perusahaan yang bersangkutan akan semakin baik, sehingga mengakibatkan atau berdampak pada semakin taatnya perusahaan tersebut dalam menaati aturan tentang *board governance*.

2.1.2.2. Umur perusahaan

Umur perusahaan mempengaruhi ketaatan *board governance* karena semakin lama umur perusahaan akan cenderung menaati peraturan yang ada karena mereka telah siap dalam menjalankannya sejalan dengan perkembangan perusahaannya. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan telah berdiri dan mendaftarkan diri ke bursa efek. Semakin lama umur maka menunjukkan perusahaan semakin mantap atau matang dalam menghadapi persaingan sehingga akan cenderung menaati peraturan tentang *board governance*. Lasfer (2002)

menyatakan bahwa umur *go public* perusahaan akan berbeda dalam ketaatan terhadap aturan *board governance*.

2.1.2.3. Jenis industri

Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Mehran (2003) berkaitan dengan struktur *corporate governance* pada industri bank dan manufaktur menyimpulkan bahwa *governance structures* di antara kedua industri tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri. Perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan *investment opportunities* sebagaimana adanya perbedaan regulasi. Hartzell dan Starks (2003) juga menyatakan bahwa pemilihan struktur *corporate governance* dipengaruhi oleh *cost* dan *benefits* yang dihadapi perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa *industry's investment opportunities, product uniqueness, competitive environment, information environment, dan leverage* mampu menerangkan struktur *corporate governance*. Lebih jauh lagi, penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor industri dan perusahaan mempengaruhi *board structure*.

2.1.3. Definisi Corporate Governance

Ada banyak definisi yang berkaitan dengan *Corporate Governance*. Pengertian *Corporate Governance* menurut Bank Dunia (1999) menyatakan *Corporate Governance* adalah aturan dan standar organisasi di bidang ekonomi

yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada investor (pemegang saham dan kreditor). *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (*Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February, 1999*).

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (*Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI*). *Corporate Governance* menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN No. S. 106/M.PM P.BUMN/2000 pada tanggal 17 April 2000 adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Corporate Governance merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya pemegang saham (*shareholder*) dan pemberi saham (*bondholders*), dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer (Schleifer dan Vishny, 1997 dalam Mudiastuty, 2003).

Tujuan utama dari *goal corporate governance* adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak lain yang terkait, melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal (Supriyanto dkk, 2005; 47). Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* (Suprayitno dkk, 2005; 84-85) yaitu:

a. Keterbukaan (*transparency*)

Mewajibkan perusahaan memberikan informasi objektif yang akurat, dan tepat waktu kepada para pemegang saham, dan institusi yang berwenang seperti Bank Indonesia (BI), Bapepam, Bursa Efek dan pihak lain yang terkait.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Adanya sistem yang kondusif agar terjadinya pengawasan yang efektif, seperti pembagian tugas dan wewenang yang jelas.

c. Keadilan (*fairness*)

Suatu kewajiban perusahaan agar para pemegang saham mengetahui secara jelas hak-haknya, terutama dari pemegang saham minoritas.

d. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Selain kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial, seperti dalam menjaga lingkungan, program kemanusiaan dan SDM. Corporate governance akan tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan dengan perusahaan.

2.1.4. Elemen-Elemen *Corporate Governance*

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan *good corporate governance* yaitu mekanisme intern dan mekanisme ekstern. Mekanisme intern berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan khususnya peranan dewan komisaris. Sedangkan mekanisme ekstern yaitu mekanisme kontrol memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar perusahaan, baik ekonomi, hukum dan sosial untuk mengontrol jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Syahkhroza (2003) menyatakan secara tegas bahwa *corporate governance* terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu fokus kepada *board* hukum dan perturan sebagai alat untuk mengerahkan dan mengendalikan, pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, tujuan organisasi, dan *strategic control*.

a. Fokus Kepada *Board*

Board adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi

pemakaian sumber daya agar selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan Indonesia yang dimaksud dengan Board adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, hal ini sebagai konsekuensi Negara Indonesia telah mengadopsi dan menggunakan sistim *Dual Board*. Sedangkan dalam konteks Institusi Pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan *Board* adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tataran yang lebih rendah lagi, yang dimaksud dengan Board adalah Kepala Daerah dan DPRD. *Good Corporate Governance* harus fokus kepada *Board* karena dewan komisaris dan dewan direksi adalah yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang cara melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan (Syahkhroza, 2003).

Steinberg dan Bromilow (2000) menyatakan secara tegas bahwa *Good Corporate Governance* dapat dibangun dalam suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki *strategy* dan *planning* yang diimplementasikan secara terukur dari waktu ke waktu. Apabila *strategy* dan *planning* terukur secara jelas, maka akan mempermudah *Board* untuk mengukur dan memantau kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan (P4) atas pengelolaan sumber daya dalam suatu

perusahaan harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan tetap berpijak dalam kaidah-kaidah E3P.

b. Hukum dan Peraturan Sebagai Alat Untuk Mengarahkan dan Mengendalikan.

Suatu organisasi membutuhkan suatu perangkat hukum dan peraturan yang ditujukan kepada *Board* untuk melindungi dan memagari agar keputusan yang dibuat oleh *Board* dapat *independent* dan pengelolaan sumber daya perusahaan dapat optimal. Pengertian hukum di sini bukan hanya perangkat hukum yang berasal dari luar perusahaan saja seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana, Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Perbankan, Standar Akuntansi, Peraturan Bapepam dan Pasar Modal dan sebagainya, tetapi juga produk hukum internasional perusahaan seperti Kebijakan Perusahaan, Prosedur Standar Operasi dan sebagainya. Produk hukum dalam membangun *Good Corporate Governance* harus ditaati tanpa mengganggu board dan Manajemen Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Syahkhroza, 2003).

c. Pengelolaan sumber daya dengan Kaidah E3P

Perangkat hukum dan peraturan yang ada digunakan untuk memberikan pedoman yang berisi petunjuk dan batasan kepada Board untuk bertindak lebih *independent*. *Board governance* yang baik tentu akan berupaya secara terus menerus untuk mengalokasikan sumber daya secara maksimal dalam kerangka pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya ini tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P dengan selalu berorientasi kepada tujuan perusahaan. Steinberg dan Bromilow (2000) menyatakan secara tegas bahwa *good corporate governance* akan bisa dibangun dalam suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki *strategy* dan *planning* (lazim disebut *strategic planning*) yang dapat diimplementasikan secara terukur dari waktu ke waktu.

d. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Pada april 1998, OECD telah mengeluarkan seperangkat prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin, hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik system hukum, budaya dan lingkungan yang berbeda. Prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua Negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi lima hal sebagai berikut yaitu perlindungan terhadap pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas dewan komisaris (Agustine dan Amelinda, 2005):

1) Perlindungan terhadap Pemegang Saham

Good corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal (Shleiver dan Vishny, 1997). Kerangka yang dibangun dalam *good corporate governance* juga harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk: (Agustine dan Amelinda, 2005)

- a) Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
- b) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya
- c) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
- d) Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
- e) Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
- f) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2) Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Pemegang Saham

Kerangka *Good Corporate Governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berbeda

dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing* dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) (Agustine dan Amelinda, 2005).

3) Peranan Stakeholder yang Terkait dengan Perusahaan

Good corporate governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang lebih baik untuk kepentingan *stakeholder* (Khomsiyah, 2003). Kerangka *good corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholder* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.

4) Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka *good corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, di samping itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi (Agustine dan Amelinda, 2005).

5) **Akuntabilitas Dewan Komisaris**

Kerangka *good corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewewangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta Pihak regulator Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ), berupaya memperbaiki *good corporate governance* perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan membuat *Code for Good Corporate Governance* dan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 butir C mengenai *Board Governance* perusahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan tercatat wajib memiliki:

- a) Komisaris Independen, yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota komisaris.
- b) Komite Audit, yang keanggotaannya sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan seorang diantaranya

merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.

- c) Sekretaris Perusahaan, yang dilaksanakan oleh salah seorang direktur atau pejabat Perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan.

e. Tujuan Organisasi

Pentingnya penegakan *good corporate governance* merupakan cerminan keseriusan *Board* dalam memberikan komitmen kepada pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. *Board governance* yang telah tertata dengan baik akan selalu concern terhadap operasional perusahaan, untuk itu *board* akan menyiapkan suatu perangkat pengukuran kinerja yang sejalan dengan tujuan organisasi yang dipakai oleh *board* sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja perusahaan (Syahkhroza, 2003).

f. *Strategic Control*

Strategic control adalah suatu proses untuk mengawasi apakah strategi yang diharapkan semula telah dilaksanakan atau tidak, selain itu *strategic control* adalah suatu proses terus menerus tentang performa operasional, pemrograman aktivitas perusahaan dan perubahan strategi perusahaan. Salah satu instrument *strategic control* perusahaan menunjukkan bahwa *good corporate*

governance merupakan alat pengendalian strategis perusahaan (Sofyan, 2010).

2.1.5. Cakupan *Board Governance*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *good corporate governance* fokus kepada *Board* tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kakabadse dan Kouzman (2001) menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki *board governance* yang baik maka perusahaan tersebut akan memiliki kinerja yang baik pula, dengan demikian *board governance* merupakan salah satu faktor input kunci untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mencapai tujuan organisasi.

Syakhroza (2003) menyatakan bahwa *board governance* yang baik harus didukung oleh instrumen pengopersian secara jelas, yaitu dengan adanya *Best Practice* dan *Code of Conduct Corporate Governace*. Kedua instrument ini sangat penting bagi *Board* agar mereka lebih dapat bertindak secara independen dalam mengelola sumber daya perusahaan, di samping kedua instrument tersebut, suatu perusahaan harus memiliki berbagai standar dan prosedur operasi yang baku untuk semua unit kerjanya. Hal ini penting dilakukan agar mekanisme pengendalian operasional menjadi lebih mudah sehingga tata kelola perusahaan menjadi lebih terkontrol. Perangkat-perangkat kebijakan dan peraturan juga diperlukan untuk memagari operasional perusahaan. Agar mekanisme pengendalian internal maupun eksternal dapat efektif untuk dieksekusikan maka diperlukan suatu

seperangkat pengukuran kinerja yang tidak hanya *Board* tetapi juga manajemen dalam pemantauan kinerja.

Dalam tahap *output*, biasanya mekanisme yang paling sering digunakan adalah melalui laporan keuangan. Pada saat ini laporan keuangan harus didukung oleh laporan non keuangan lainnya. Dalam konteks *strategic* manajemen, *good corporate governance* yang baik apabila *Board* berhasil mencapai tujuan akhir perusahaan yaitu tidak hanya kepada pemuasan terhadap *shareholder* tetapi juga *stakeholder* lainnya yaitu, *costumers*, *suppliers*, *local community*, *government*, dan sebagainya (Syakhroza, 2003).

2.2. Penelitian Terdahulu

Menurut Klapper dan Love (2002) pengaruh ukuran perusahaan yang dikur menggunakan logaritma natural dari asset terhadap *good corporate governance* masih belum jelas arahnya. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena lebih sulit untuk dimonitor, sehingga membutuhkan *good corporete governance* yang lebih baik. Di sisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi sehingga membutuhkan mekanisme *good corporate governance* yang lebih baik. Praktik *good corporate governance* dipengaruhi oleh lingkungan luar maupun keadaan di dalam perusahaan. Lingkungan luar yang dimaksud *legality*, aturan mengenai *stakeholder rights*, dan *judicial efficiency*, sedangkan keadaan di dalam perusahaan yang mempengaruhi *good corporete governance* adalah *growth opportunities* dan peranan *intangibile assets*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Mehran (2003) berkaitan dengan struktur *corporate governance* pada industri bank dan manufaktur menyimpulkan bahwa *governance structures* di antara kedua industri tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri. Perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan *investment opportunities* sebagaimana adanya perbedaan regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gillan, Hartzell dan Starks (2003) juga menyatakan bahwa pemilihan struktur *corporate governance* dipengaruhi oleh *cost* dan *benefits* yang dihadapi perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa *industry's investment opportunities, product uniqueness, competitive environment, information environment, dan leverage* mampu menerangkan struktur *corporate governance*. Lebih jauh lagi, penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor industri dan perusahaan mempengaruhi *board structure*.

Penelitian Syakhorza (2003) menyatakan bahwa faktor budaya dan sistem politik akan mempengaruhi perkembangan penerapan *corporate governance*. Darmawati juga menyatakan bahwa dengan adanya *corporate governance* yang semakin baik akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Nuryanah (2004), meneliti bahwa variabel industri mampu menerangkan tingkat responsivitas emiten dalam menerapkan aturan *board governance* berkaitan dengan struktur dan komposisi *board governance*. Besar aset perusahaan dan umur *go public* emiten tidak mempengaruhi komposisi dan karakteristik *board governance*. Asosiasi industri dan juga peraturan-peraturan

yang berlaku di masing-masing industri turut mempengaruhi *board governance* perusahaan. Probabilitas emiten selain industri bank dan sektor keuangan untuk menerapkan aturan *board governance* lebih rendah dibanding dengan emiten yang termasuk industri bank dan sejenisnya. Emiten beraset besar dan termasuk dalam industri bank, lembaga keuangan lain selain bank dan asuransi, lebih responsif atau taat dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

Hasil penelitian Augustine dan Amelinda (2005) dengan menggunakan sample perusahaan manufaktur pada tahun 2003 menunjukkan bahwa emiten beraset kecil memiliki probabilitas untuk menerapkan aturan *Board Governance* lebih rendah dibanding emiten beraset besar. Penelitian Augustine dan Amelinda (2005) tentang responsivitas ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* menyatakan bahwa berdasarkan analisis empiris dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka data disimpulkan bahwa pengujian secara simultan oleh semua variable maka besarnya aset dan umur *go public* emiten tidak mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan mengenai *Board Governance*.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Tahun | Variabel | Alat analisis | Hasil Penelitian |
|----|------------------|-------|---|---------------------------|--|
| 1. | Klapper dan Love | 2002 | Ukuran perusahaan <i>Good corporate governance</i> | Analisis regresi berganda | Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena lebih sulit untuk dimonitor, sehingga membutuhkan <i>good corporate governance</i> yang lebih baik. Praktik <i>good corporate governance</i> dipengaruhi oleh lingkungan luar maupun keadaan di dalam perusahaan. Lingkungan luar yang dimaksud <i>legality</i> , aturan mengenai <i>stakeholder rights</i> , dan <i>judicial efficiency</i> , sedangkan, keadaan di dalam perusahaan yang mempengaruhi <i>good corporate</i> |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------|--|---------------------------|---|
| | | | | | <i>governance</i> adalah growth opportunities dan peranan <i>intangible assets</i> . |
| 2. | Adams dan Mehran | 2003 | Struktur <i>corporate governance</i> Jenis industri | Analisis uji beda t-test | Ada perbedaan struktur <i>corporate governance</i> pada industri bank dan manufaktur. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur <i>corporate governance</i> adalah spesifik industri. Perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan <i>investment opportunities</i> sebagaimana adanya perbedaan regulasi. |
| 3. | Gillan, hartzell dan Starks | 2003 | <i>Corporate governance</i> <i>Cost and benefits</i> | Analisis regresi | Pemilihan struktur <i>corporate governance</i> dipengaruhi oleh <i>cost</i> dan <i>benefits</i> yang dihadapi perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa <i>industry's investment opportunities, product uniqueness, competitive environment, information environment, dan leverage</i> mampu menerangkan struktur <i>corporate governance</i> |
| 4. | Syakhroza | 2003 | <i>Corporate governance</i> Budaya, politik | Analisis regresi | Faktor budaya dan sistem politik akan mempengaruhi perkembangan penerapan <i>corporate governance</i> . |
| 5. | Nuryanah | 2004 | Jenis industri Asset perusahaan Umur perusahaan <i>Board governance</i> | Analisis regresi logistik | Variabel industri mampu menerangkan tingkat responsivitas emiten dalam menerapkan aturan <i>board governance</i> berkaitan dengan struktur dan komposisi <i>board governance</i> . Besar aset perusahaan dan umur <i>go public</i> emiten tidak mempengaruhi komposisi dan karakteristik <i>board governance</i> . Asosiasi industri dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing industri turut mempengaruhi <i>board governance</i> perusahaan. Probabilitas emiten selain industri bank dan sektor keuangan untuk menerapkan aturan <i>board governance</i> lebih rendah dibanding dengan emiten yang termasuk |

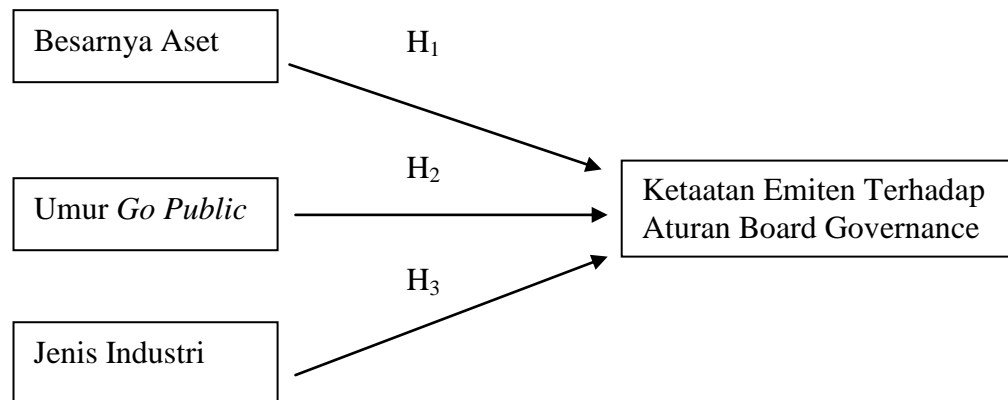
| | | | | | |
|----|------------------------|------|--|---------------------------|--|
| | | | | | industri bank dan sejenisnya. Emiten beraset besar dan termasuk dalam industri bank, lembaga keuangan lain selain bank dan asuransi, lebih responsif atau taat dalam menerapkan aturan <i>Board Governance</i> . |
| 6. | Augustine dan Amelinda | 2005 | Aset perusahaan Ketaatan <i>board governance</i> Umur perusahaan | Analisis regresi logistic | Emiten beraset kecil memiliki probabilitas untuk menerapkan aturan Board Governance lebih rendah dibanding emiten breast besar. Penelitian Augustine dan Amelinda (2005) tentang responsivitas ketaatan emiten terhadap aturan <i>board governance</i> menyatakan bahwa berdasarkan analisis empiris dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka data disimpulkan bahwa pengujian secara simultan oleh semua variable maka besarnya asset dan umur <i>go public</i> emiten tidak mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan mengenai Board Governance. |

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka *good corporate governance*, sebuah perusahaan terutama perbankan dituntut untuk menaati aturan yang ada, sehingga harus menaati lima prinsip dasar. Pertama, tranparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh besarnya aset, umur *go public*, dan jenis industri terhadap ketaatan emiten terhadap aturan board governance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2008. Semakin besar aset perusahaan dan semakin panjang umur *go public* maka akan mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* karena semakin besar aset berarti akan cenderung menjaga citra perusahaannya di mata publik sehingga akan semakin taat terhadap peraturan *board governance* dan semakin panjang umur maka akan semakin membuat perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menaati *board governance*, sehingga implementasi *good corporate governance* pada perusahaan semakin baik, dan hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan saham. Jenis industri yang berbeda juga akan mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* karena perbedaan karakteristik setiap jenis industri. Maka dapat diuraikan kerangka pemikiran seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran hipotesis alternatif yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

2.4.1. Pengaruh Besarnya Aset terhadap Ketaatan Emiten dalam Menerapkan Aturan *Board Governance*

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) berupaya memperbaiki *corporate governance* dengan mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam *code for good corporate governance* dan peraturan yang berkaitan dengan *corporate governance*, yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* diantaranya adalah aset perusahaan. Suwardjono (2005) menjelaskan bahwa besarnya aset merupakan besarnya sumber-sumber ekonomi perusahaan yang dilakukan dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tanggungan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Secara resmi besarnya aset didefinisikan sebagai besarnya manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (FASB1980).

Klepper dan Love (2002) menunjukkan bahwa praktik *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh lingkungan luar maupun keadaan di dalam perusahaan. Lingkungan luar yang dimaksud *legality*, aturan mengenai *stakeholder rights*, dan *judicial efficiency*, sedangkan, keadaan di dalam perusahaan yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* adalah *growth opportunities* dan peranan *intangible assets*.

H1 : Besarnya aset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

2.4.2. Pengaruh Umur *Go Public* terhadap Ketaatan Emiten dalam Menerapkan Aturan *Board Governance*

Menurut Andari (2004), pasar modal mempunyai peran strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu Negara karena pasar modal merupakan suatu mediator bagi bertemunya dua pihak yaitu pihak yang memerlukan dana (perusahaan) dan investor.

Umur perusahaan mempengaruhi ketaatan *board governance* karena semakin lama umur perusahaan akan cenderung menaati peraturan yang ada karena mereka telah siap dalam menjalankannya sejalan dengan perkembangan perusahaannya.

Perusahaan besar dan yang telah lama *go public* tidak atau kecil kemungkinannya menghadapi masalah dalam menerapkan peraturan yang diharuskan oleh pihak regulator, begitu pula dalam menerapkan peraturan mengenai *Board Governance* (Nuryanah, 2004).

Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Umur go public perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

2.4.3. Pengaruh Jenis Industri terhadap Ketaatan Emitan dalam Menerapkan Aturan *Board Governance*

Menurut Winarno dan Ismaya (2003), industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah/ barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang jadi tapi juga dalam bentuk jasa. Jenis/ macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku: (Winarno dan Ismaya, 2003)

a. Industri ekstratif

Industri ekstratif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh: perkebunan, perhutanan, pertanian dll.

b. Industri non ekstratif

Industri non ekstratif adalah industri yang bahan bakunya diperoleh dari tempat lain alam sekitar.

c. Industri fasilitatif

Industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dapat dijual kepada para konsumennya. Contoh: asuransi, perbankan, jasa.

Struktur *good corporate governance* pada industri bank dan manufaktur menyimpulkan bahwa *governance structures* di antara kedua industri tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri. Perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan *investment opportunities* sebagaimana adanya perbedaan regulasi (Nuryanah, 2004). Pihak regulator pada bank dan sektor keuangan menerapkan aturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini direalisasikan pada fungsi monitoring pada tataran manajemen. Pembentukan *board governance* dalam bentuk yang ideal merupakan keharusan bagi perusahaan-perusahaan yang berada di industri perbankan dan sektor keuangan (Nuryanah 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Mehran (2003) berkaitan dengan struktur *corporate governance* pada industri bank dan manufaktur menyimpulkan bahwa *governance structures* di antara kedua industri tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3 : Jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pada penelitian ini variabel dependennya adalah ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*. Ketaatan terhadap aturan *board governance* adalah seberapa taat para emiten terhadap peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah besarnya aset, umur *go public*, dan jenis industri.

3.1.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Bagian ini membahas definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*

Ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* adalah seberapa taat para emiten terhadap peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, berupa perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal yang menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat (Nuryanah, 2004). Meskipun kepatuhan emiten terhadap Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 butir C berkaitan dengan pembentukan dewan komisaris dan komite audit bisa dibagi menjadi tujuh kategori, namun tujuh kategori tersebut dapat dibagi dalam dua kategori besar, yaitu emiten-emiten yang taat terhadap peraturan *board governance* dengan yang tidak taat (Nuryanah, 2004). Alasan lain adalah untuk menghindari jumlah kategori yang terlalu banyak, dimana terlalu banyak kategori bisa membuat hasil perhitungan yang kacau. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua kategori tersebut sebagai variabel yang akan diteliti yaitu hanya melihat kepada keberadaan komisaris independen dan komite audit. Alasannya adalah karena keduanya adalah komponen pokok untuk *board governance* sesuai dengan Kep-315/BEJ/06 2000 butir C mengenai *board governance* (Bapepam, 2000). Kategori emiten, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori Ketaatan Emiten

| Kategori | Komisaris independen | Komite audit |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Memenuhi ketentuan | Memenuhi | Memenuhi |
| Belum / tidak memenuhi ketentuan | Memenuhi | Tidak memenuhi |
| | Tidak memenuhi | Memenuhi |
| | Tidak memenuhi | Tidak memenuhi |

Berdasarkan pada tabel 3.1. maka dapat dijelaskan bahwa apabila laporan keuangan perusahaan memenuhi (ada) komisaris independen dan komite audit maka dikatakan memenuhi ketentuan, sedangkan apabila salah satunya tidak memenuhi maka dikatakan tidak atau belum memenuhi ketentuan *board governance*.

Penentuan nilai untuk kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. $Y=0$ adalah untuk kategori emiten yang belum memenuhi ketentuan baik yang berkaitan dengan komisaris independen maupun komite audit.
- b. $Y=1$ adalah untuk kategori emiten yang komisaris independen dan komite auditnya sesuai dengan ketentuan.

2. Besarnya Aset

Besarnya aset adalah besarnya sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan manfaat ekoominya di masa depan. Besarnya aset diukur berdasarkan logaritma natural aset pada tahun 2008. Alasannya adalah supaya sebaran data tidak terlalu besar maka dilakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural (Ghozali, 2006).

3. Umur *Go Public*

Umur *Go Public* adalah setiap usaha untuk menjual, menawarkan atau untuk melepaskan hak atas pemegang saham dengan pembayarannya. Umur *go public* dihitung dari awal perusahaan go public sampai dengan tahun 2008.

4. Jenis Industri

Jenis industri adalah keragaman jenis industri perusahaan tersebut. Jenis Industri Perusahaan dikelompokkan menjadi dua kategori (Nuryanah, 2004), yaitu:

- 1) Industri bank, lembaga kredit lainnya selain bank, dan asuransi.
- 2) Industri lainnya.

Berdasarkan penelitian Nuryanah (2004) variabel jenis industri perusahaan menjadi variabel *dummy*. Alasannya adalah untuk membedakan antara karakteristik bank dengan perusahaan non bank. Kategorinya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Jenis Industri

| Jenis Industri | Variabel <i>dummy</i> |
|---|------------------------------|
| Industri bank, lembaga kredit lainnya selain bank, dan asuransi | 1 |
| Lainnya | 0 |

Untuk industri bank, lembaga kredit dan lainnya selain bank, dan asuransi diberikan nilai 1 karena sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa dibutuhkan kredibilitas atau kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat untuk memilih perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan cenderung lebih taat dalam menaati aturan *board governance* maka diberikan angka 1.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008. Alasannya adalah menggunakan data terbaru dan pada periode tersebut sedang terjadi krisis global sehingga akan diketahui dampaknya terhadap ketaatan terhadap *board governance*.

3.2.2. Penentuan Sampel

Perusahaan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Alasannya adalah pada tahun 2008 adalah periode dimana terjadi krisis global, sehingga dengan adanya krisis global tersebut kinerja pada pasar saham akan terpengaruh dan menjadi lebih buruk, hal ini tentunya akan memicu para emiten untuk semakin taat dalam menerapkan prinsip *board governance* untuk menarik investor dalam menanamkan saham atau investasinya pada perusahaan yang bersangkutan. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan adalah:

1. Emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 yang telah memenuhi atau belum memenuhi aturan *board governance* (yaitu berkaitan dengan dewan komisaris dan komite independen) yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta.

2. Emiten-emiten tersebut telah menerbitkan laporan keuangan 2008 yang tercantum dalam *Indonesian Capital Market Directory*.

Alasan dipilihnya tahun 2008 sebagai tahun pengamatan adalah karena pada tahun 2008 tersebut terjadi krisis global yang mempengaruhi kinerja saham pada pasar modal Indonesia, yaitu BEI.

Dari jumlah populasi sebanyak 289 perusahaan, karena ada perusahaan dengan data yang tidak lengkap, maka sampel akhir yang diperoleh adalah 178 perusahaan.

Tabel 3.3 Kriteria Sampel Penelitian

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1. | Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 | 289 |
| 2. | Perusahaan yang datanya tidak lengkap untuk dewan komisaris dan komite independen | (111) |
| 3. | Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan | (0) |
| | Jumlah sampel: | 178 |

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui dokumentasi, yang berupa besarnya aset, umur *go public* dan data kualitatif jenis industri diperoleh melalui *Indonesian Capital Market Directory* 2008.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Pustaka

Data dan teori dalam penelitian ini diperoleh dari literaturer, jurnal, dan penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan teori.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 yang dapat dilihat dalam laporan keuangan dan *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*.

3.5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan *Logistic Regression*. Alasan digunakannya analisis dengan regresi logistik adalah karena variabel dependen pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy* maka alat analisis yang sesuai adalah regresi logistik (Ghozali, 2006).

Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\ln [\text{odds}(S | \text{Aset, Umr, Ind})] = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana:

b_0 = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi aset

b_2 = Koefisien regresi umur

b_3 = Koefisien regresi jenis industri

X_1 = Variabel aset

X_2 = Variabel umur

X_3 = Variabel jenis industri

Rumus perhitungan odds adalah:

$$\text{Odds} = \frac{p}{1-p}$$

Persamaan regresi diatas bias dituliskan menjadi:

$$\text{Ln} \left[\frac{p}{1-p} \right] = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dari persamaan rumus di atas dapat di transformasikan menjadi:

$$\frac{p}{1-p} = e^{(b_0+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3)}$$

Karena menggunakan analisis regresi logistik, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (Ghozali, 2005). Tetapi perlu dilakukan pengujian model fit, seperti akan diuraikan berikut ini.

Data tersebut dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran antara deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kuortis dan skewness (Ghozali, 2006)

3.5.2. Logistic Regression

Logistic regression sebetulnya mirip dengan anaisis diskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2006).

Logistic Regression ini digunakan karena variabel dependen pada penelitian ini berupa variabel *dummy* (menggunakan skala nominal) dan sampel

yang digunakan besar. Selain itu Logistic Regression digunakan jika asumsi multivariate normal distribution tidak dipenuhi. Probabilitas kadang-kadang dinyatakan dalam istilah odds. Odds dan probabilitas memberikan informasi yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda (Ghozali, 2006). Analisis yang dapat digunakan dalam adalah:

1. Pengujian Kelayakan Model Regresi

Pengujian kelayakan model regresi logistic dilakukan dengan menggunakan *Goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-square* pada bagian bawah uji *Hosmer dan Lemeshow*. Apabila nilai *Chi-square* $>$ alpha 0,05 maka model regresi layak digunakan untuk analisis sebelumnya.

2. Menilai Model Fit

Pengujian model *fit* dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (*Block Mumber=0*) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (*Block Mumber=1*). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (*initial -2LL function*) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

3. Uji Secara Simultan

Pengujian secara simultan dengan menggunakan tabel *Omnibus Test of Model Coefficient* pada nilai *Chi-square*. Apabila nilai *Chi-square* $<$ alpha, maka besarnya aset, umur *go public* dan jenis industri secara bersama-sama mampu memengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh Nilai Negelkerke R square. Nilai koefisien determinasi antara 0-1. Semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat.

5. Model Klasifikasi

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

6. Menguji Koefisien Regresi

Koefisien regresi digunakan untuk melihat signifikansi hipotesis yang diuji terhadap alpha 0,05. Apabila nilai p value < alpha maka hipotesis diterima, artinya besarnya aset, umur *go public* dan jenis industri mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan yang dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh sampel sebanyak 178 perusahaan. Adapun nama-nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

| No. | Kode Saham | Bidang Usaha |
|-----|------------|--------------------------------|
| 1 | ADES | Food and Beverages |
| 2 | ADMG | Automotive and Allied Products |
| 3 | AQUA | Food and Beverages |
| 4 | DLTA | Food and Beverages |
| 5 | FAST | Food and Beverages |
| 6 | INDF | Food and Beverages |
| 7 | MYOR | Food and Beverages |
| 8 | MLBI | Food and Beverages |
| 9 | PTSP | Food and Beverages |
| 10 | PSDN | Food and Beverages |
| 11 | SKBM | Food and Beverages |
| 12 | SKLT | Food and Beverages |
| 13 | STTP | Food and Beverages |
| 14 | SMART | Food and Beverages |
| 15 | AISA | Food and Beverages |
| 16 | TBLA | Food and Beverages |
| 17 | ULTJ | Food and Beverages |
| 18 | BATI | Tobacco Manufacturers |
| 19 | RMBA | Tobacco Manufacturers |
| 20 | GGRM | Tobacco Manufacturers |
| 21 | HMSP | Tobacco Manufacturers |
| 22 | CNTX | Textile mill Products |

| | | |
|----|------|------------------------------------|
| 23 | PAFI | Textile mill Products |
| 24 | HDTX | Textile mill Products |
| 25 | RDTX | Textile mill Products |
| 26 | TFCO | Textile mill Products |
| 27 | UNTX | Textile mill Products |
| 28 | ESTI | Textile mill Products |
| 29 | MYRX | Apparel and Other Textile Products |
| 30 | SRSN | Apparel and Other Textile Products |
| 31 | INDR | Apparel and Other Textile Products |
| 32 | KARW | Apparel and Other Textile Products |
| 33 | PBRX | Apparel and Other Textile Products |
| 34 | BIMA | Apparel and Other Textile Products |
| 35 | RICY | Apparel and Other Textile Products |
| 36 | BATA | Apparel and Other Textile Products |
| 37 | SIMM | Apparel and Other Textile Products |
| 38 | BRPT | Lumber and Wood Products |
| 39 | DSUC | Lumber and Wood Products |
| 40 | SULI | Lumber and Wood Products |
| 41 | TIRT | Lumber and Wood Products |
| 42 | FASW | Paper and Allied Products |
| 43 | TKIM | Paper and Allied Products |
| 44 | SPMA | Paper and Allied Products |
| 45 | SAIP | Paper and Allied Products |
| 46 | ETWA | Chemical and Allied Products |
| 47 | AKRA | Chemical and Allied Products |
| 48 | BUDI | Chemical and Allied Products |
| 49 | CLPI | Chemical and Allied Products |
| 50 | LTLS | Chemical and Allied Products |
| 51 | POLY | Chemical and Allied Products |
| 52 | SOBI | Chemical and Allied Products |
| 53 | TPIA | Chemical and Allied Products |
| 54 | UNIC | Chemical and Allied Products |
| 55 | DPNS | Adhesive |
| 56 | EKAD | Adhesive |
| 57 | RAIN | Adhesive |
| 58 | AKKU | Adhesive |
| 59 | CEKA | Food and Beverages |
| 60 | BRNA | Plastics and Glass Products |
| 61 | DYNA | Plastics and Glass Products |
| 62 | IGAR | Plastics and Glass Products |
| 63 | LMPI | Plastics and Glass Products |

| | | |
|-----|------|--|
| 64 | SIAP | Plastics and Glass Products |
| 65 | FPNI | Plastics and Glass Products |
| 66 | TRST | Plastics and Glass Products |
| 67 | TALF | Plastics and Glass Products |
| 68 | YPAS | Plastics and Glass Products |
| 69 | SMCB | Cement |
| 70 | INTP | Cement |
| 71 | SMGR | Cement |
| 72 | ALMI | Metal and Allied Products |
| 73 | BTON | Metal and Allied Products |
| 74 | CTBN | Metal and Allied Products |
| 75 | INAI | Metal and Allied Products |
| 76 | ITMA | Metal and Allied Products |
| 77 | JKSW | Metal and Allied Products |
| 78 | JPRS | Metal and Allied Products |
| 79 | LMSH | Metal and Allied Products |
| 80 | LION | Metal and Allied Products |
| 81 | PICO | Metal and Allied Products |
| 82 | TBMS | Metal and Allied Products |
| 83 | TIRA | Metal and Allied Products |
| 84 | KICI | Fabricated Metal Products |
| 85 | KDSI | Fabricated Metal Products |
| 86 | ARNA | Stone, Clay, Glass and Concrete Products |
| 87 | IKAI | Stone, Clay, Glass and Concrete Products |
| 88 | KIAS | Stone, Clay, Glass and Concrete Products |
| 89 | MITI | Stone, Clay, Glass and Concrete Products |
| 90 | MLIA | Stone, Clay, Glass and Concrete Products |
| 91 | JECC | Cable |
| 92 | KBLM | Cable |
| 93 | KBLI | Cable |
| 94 | IKBI | Cable |
| 95 | SCCO | Cable |
| 96 | VOKS | Cable |
| 97 | ASGR | Electronic and Office Equipment |
| 98 | MTDL | Electronic and Office Equipment |
| 99 | MLPL | Electronic and Office Equipment |
| 100 | MYOH | Electronic and Office Equipment |
| 101 | PTSN | Electronic and Office Equipment |
| 102 | SQMI | Pharmaceuticals |
| 103 | ASII | Automotive and Allied Products |
| 104 | AUTO | Automotive and Allied Products |

| | | |
|-----|------|--------------------------------|
| 105 | GJTL | Automotive and Allied Products |
| 106 | GDYR | Automotive and Allied Products |
| 107 | HEXA | Automotive and Allied Products |
| 108 | BRAM | Automotive and Allied Products |
| 109 | INDS | Automotive and Allied Products |
| 110 | INTA | Automotive and Allied Products |
| 111 | LPIN | Automotive and Allied Products |
| 112 | NIPS | Automotive and Allied Products |
| 113 | ADMG | Automotive and Allied Products |
| 114 | PRAS | Automotive and Allied Products |
| 115 | SMSM | Automotive and Allied Products |
| 116 | TURI | Automotive and Allied Products |
| 117 | UNIT | Automotive and Allied Products |
| 118 | INTD | Automotive and Allied Products |
| 119 | MDRN | Photographic Equipment |
| 120 | KONI | Photographic Equipment |
| 121 | SQBI | Pharmaceuticals |
| 122 | DVLA | Pharmaceuticals |
| 123 | INAF | Pharmaceuticals |
| 124 | KLBF | Pharmaceuticals |
| 125 | KAEF | Pharmaceuticals |
| 126 | MERK | Pharmaceuticals |
| 127 | PYFA | Pharmaceuticals |
| 128 | SCPI | Pharmaceuticals |
| 129 | TPSC | Pharmaceuticals |
| 130 | TCID | Consumer Goods |
| 131 | MRAT | Consumer Goods |
| 132 | PROD | Consumer Goods |
| 133 | UNVR | Consumer Goods |
| 134 | INPC | Banking |
| 135 | ANKB | Banking |
| 136 | BABP | Banking |
| 137 | BBCA | Banking |
| 138 | BCIC | Banking |
| 139 | BDMN | Banking |
| 140 | BEKS | Banking |
| 141 | LPBN | Banking |
| 142 | BMRI | Banking |
| 143 | MAYA | Banking |
| 144 | MEGA | Banking |
| 145 | BBNI | Banking |

| | | |
|-----|------|--|
| 146 | BNGA | Banking |
| 147 | NISP | Banking |
| 148 | BNLI | Banking |
| 149 | BBRI | Banking |
| 150 | BBKP | Banking |
| 151 | MCOR | Banking |
| 152 | BNBA | Banking |
| 153 | BBIA | Banking |
| 154 | BFIN | Credit Agencies Other than Bank |
| 155 | PNBN | Banking |
| 156 | CFIN | Credit Agencies Other than Bank |
| 157 | DEFI | Credit Agencies Other than Bank |
| 158 | OKAS | Credit Agencies Other than Bank |
| 159 | ABDA | Insurance |
| 160 | ASBI | Insurance |
| 161 | ASDM | Insurance |
| 162 | ASJT | Insurance |
| 163 | AMAG | Insurance |
| 164 | ASRM | Insurance |
| 165 | BAEK | Insurance |
| 166 | SDRA | Banking |
| 167 | BNII | Banking |
| 168 | BKSW | Banking |
| 169 | BSWD | Banking |
| 170 | BTPN | Banking |
| 171 | BVIC | Banking |
| 172 | BHIT | Banking |
| 173 | BBLD | Banking |
| 174 | EXCL | Telecommunication |
| 175 | TLKM | Telecommunication |
| 176 | HERO | Whole Sale and Retail Trade |
| 177 | INDX | Holding and Other Investment Companies |
| 178 | YULE | Others |

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2010)

4.2. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai statistik deskriptif dari penelitian ini, yang meliputi nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Aset | 178 | 9,37 | 14,00 | 11,3939 | ,80184 |
| Umur | 178 | 1,00 | 19,00 | 6,3652 | 3,29977 |
| Jenis_industri | 178 | ,00 | 1,00 | ,2247 | ,41857 |
| Board_Governance | 178 | ,00 | 1,00 | ,4719 | ,50062 |
| Valid N (listwise) | 178 | | | | |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

4.2.1. Aset

- a. Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa ternyata dari 178 sampel pada penelitian ini logaritma total asset (Aset) memiliki nilai minimum 9,37. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum dengan meannya tidak terlalu besar selisihnya.
- b. Nilai maksimumnya adalah 14,00 dan hal ini mengindikasikan bahwa selama setahun nilai terbesar dari logaritma asset adalah 14.
- c. Nilai rata-rata atau mean dari variabel asset adalah sebesar 11,3939 yang menunjukkan rata-rata selama setahun perusahaan sampel penelitian ini memiliki rata-rata dari logaritma asset 11,3939.
- d. Nilai untuk deviasi standar adalah sebesar 0,80184. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi sebesar 0,80814 dan nilai ini tidak terlalu besar.

4.2.2. Umur

- a. Untuk variabel Umur memiliki nilai minimum 1,00 yang berarti dari 178 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini paling muda baru berumur 1 tahun.
- b. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 19,00 yang artinya dari semua perusahaan sampel paling tua berumur 19 tahun.
- c. Nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 6,3652. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari 178 perusahaan sampel penelitian ini rata-rata atau sebagian besar telah terdaftar di BEI selama 6 tahun.
- d. Nilai untuk deviasi standar atau penyimpangannya adalah sebesar 3,29977. Karena nilai penyimpangan lebih kecil daripada mean (6,3652) maka dikatakan distribusi data cenderung normal.

4.2.3. Jenis Industri

- a. Untuk variabel jenis industri memperoleh nilai minimum 0,00 yang artinya ada perusahaan yang termasuk dalam kategori non lembaga kredit, perbankan, asuransi (karena menggunakan variabel *dummy*).
- b. Nilai maksimum adalah 1,00 yang artinya ada perusahaan yang termasuk kategori industry bank, lembaga kredit, dan asuransi (karena menggunakan variabel *dummy*).

- c. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 0,2247 yang artinya sebagian besar perusahaan sampel penelitian ini termasuk kategori non lembaga kredit, perbankan, asuransi karena nilainya di bawah 0,5.
- d. Nilai deviasi standar atau penyimpangan sebesar 0,41857. Artinya terjadi penyimpangan sebesar 0,41857 dan nilainya tidak terlalu besar.

4.2.4. Ketaatan *Board Governance*

- a. Untuk variabel ketaatan *board governance* memiliki nilai minimum 0,00. Artinya dari 178 perusahaan sampel penelitian ini ada perusahaan yang belum memenuhi ketentuan baik yang berkaitan dengan komisaris independen maupun komite audit (karena menggunakan variabel *dummy*).
- b. Nilai maksimumnya adalah 1,00 yang artinya dari 178 perusahaan sampel penelitian ini ada emiten yang telah memenuhi kategori komisaris independen dan komite audit sesuai dengan aturan (karena menggunakan variabel *dummy*).
- c. Sedangkan nilai mean atau rata-ratanya sebesar 0,4719. Artinya sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini masih kurang taat atau cukup taat saja terhadap aturan tentang *board governance* karena nilainya di bawah 0,5.
- d. Nilai deviasi standarnya adalah sebesar 0,50062. Artinya memiliki nilai penyimpangan sebesar 0,50062.

Tabel 4.4. Frekuensi (Jumlah) Perusahaan Berdasarkan Jenis Industri

| Jenis_industri | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | ,00 | 138 | 77,5 | 77,5 |
| | 1,00 | 40 | 22,5 | 100,0 |
| Total | | 178 | 100,0 | |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Untuk jenis industri bank, lembaga kredit dan asuransi ada 40 perusahaan (22,5%) dan sisanya 77,5% (138 perusahaan) termasuk dalam industri lainnya, terutama manufaktur.

Tabel 4.5. Frekuensi (Jumlah) Perusahaan Berdasarkan Board Governance

| Board_Governance | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | ,00 | 94 | 52,8 | 52,8 |
| | 1,00 | 84 | 47,2 | 100,0 |
| Total | | 178 | 100,0 | |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Untuk ketaatan terhadap aturan *board governance*, ada 84 perusahaan (47,2%) yang telah memenuhi atau memiliki komisaris independen dan komite audit, sedangkan sisanya 52,8% (94 perusahaan) belum memenuhi ketentuan *board governance* atau tidak memenuhi keberadaan salah satu dari komisaris independen dan atau komite audit, atau keduanya.

4.3. Pengujian Model Fit

Model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model dapat diterima jika nilai *Hosmer dan Lemeshow's Goodness of Fit Test* $> 0,05$.

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer dan Lemeshow's Goodness of Fit* sebesar 9,264 dengan probabilitas signifikansi 0,321 yang nilainya lebih besar daripada α (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model fit dan dapat diterima.

Tabel 4.6. Hosmer dan Lemeshow's Goodness of Fit Test

| Step | Chi-square | df | Sig. |
|------|------------|----|------|
| 1 | 9,264 | 8 | ,321 |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Untuk pengujian dengan nilai Omnibus test of model coefficients diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7. Omnibus test of Model Coefficients

Omnibus Tests of Model Coefficients

| | | Chi-square | df | Sig. |
|--------|-------|------------|----|------|
| Step 1 | Step | 3,697 | 3 | ,296 |
| | Block | 3,697 | 3 | ,296 |
| | Model | 3,697 | 3 | ,296 |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai chi square 3,697 dan sig. sebesar $0,296 > 0,05$ (alpha) maka dengan demikian besarnya asset, umur go public dan jenis industry secara bersama-sama mampu mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*.

Untuk memperjelas gambaran penjelasan ketepatan model regresi logistic dapat dilihat pada tabel klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.8. Tabel Klasifikasi

Classification Table

| Observed | | Predicted | | |
|----------|----------------------|------------------|------|--------------------|
| | | Board_Governance | | Percentage Correct |
| | | ,00 | 1,00 | |
| Step 1 | Board_Governance ,00 | 78 | 16 | 83,0 |
| | 1,00 | 60 | 24 | 28,6 |
| | Overall Percentage | | | 57,3 |

a. The cut value is ,500

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 94 perusahaan yang termasuk tidak taat terhadap aturan *board governance*, sebanyak 78 perusahaan atau 83,0% yang secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini sebagai perusahaan yang termasuk tidak taat terhadap aturan *board governance*. Sedangkan dari 84 perusahaan yang termasuk taat terhadap aturan *board governance*, sebanyak 60 perusahaan dapat diprediksi dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik (28,6%). Dengan demikian secara keseluruhan dari 178 perusahaan hanya 57,3% yang dapat diprediksikan dengan tepat oleh model logistik ini. Tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi yang baik.

Kemudian langkah selanjutnya adalah menilai model fit dengan menggunakan $-2\log$ likelihood. Berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4.9. Tabel Iteration History -2 Log Likelihood

| Iteration | -2 Log Likelihood |
|-----------|-------------------|
| 1 | 246,198 |
| 2 | 242,502 |
| 3 | 242,501 |
| 4 | 242,501 |

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2LogL yaitu tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar 246,198 setelah dimasukkannya 3 variabel baru maka nilai -2LogL turun menjadi 242,501 dan setelah semua variabel dimasukkan menjadi 242,501 atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 3,697 dan penurunan ini signifikan dibandingkan dengan tabel yaitu 1,98. Hal ini berarti penambahan variabel independen (Aset, Umur, dan Jenis industri) dapat digunakan.

Tabel 4.10. Nagelkerke R Square

Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 242,501 ^a | ,312 | ,621 |

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2010)

Untuk mengetahui besarnya variasi prediksi dari variable independen terhadap dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Hal ini berarti diketahui bahwa dengan ukuran Nagelkerke R Square diperoleh 62,1% variasi ketaatan terhadap *board governance* dapat diprediksi dari Aset, Umur, dan Jenis industri.

4.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*), dengan menggunakan alat analisis regresi logistik. Hasil pengujian regresi logistik tersebut dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Hipotesis

| | | n | | | | | |
|------------------------|----------------|------|-------|-------|----|------|--------|
| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
| Step 1 ^a | Aset | ,483 | ,198 | 4,237 | 1 | ,026 | ,410 |
| | Umur | ,135 | ,018 | 3,682 | 1 | ,045 | ,866 |
| | Jenis_industri | ,592 | ,281 | 3,117 | 1 | ,034 | ,475 |
| | Constant | ,368 | 2,241 | ,027 | 1 | ,870 | 1,444 |

a. Variable(s) entered on step 1: Aset, Umur, Jenis_industri.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2010)

Hasil pengujian regresi dapat ditunjukkan sebagai berikut :

4.3.1. Hipotesis 1

H1 : Besarnya asset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah asset mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan Board Governance. Nilai p-value sebesar 0,026 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar +0,483, maka signifikan pada level 5% dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki total asset semakin besar akan semakin besar kecenderungannya untuk taat dalam menerapkan aturan Board Governance.

4.3.2. Hipotesis 2

H2 : Umur go public perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah umur go public mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan Board Governance. Nilai p-value sebesar 0,045 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar +0,135, maka signifikan pada level 5% dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki umur go public semakin besar akan semakin besar kecenderungannya untuk taat dalam menerapkan aturan Board Governance.

4.3.3. Hipotesis 3

H3 : Jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah jenis industri mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan Board Governance. Nilai p-value sebesar 0,034 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar +0,592, maka signifikan pada level 5% dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki jenis industry perbankan, lembaga kredit dan asuransi, akan semakin besar akan semakin besar kecenderungannya untuk taat dalam menerapkan aturan Board Governance.

Tabel 4.12. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| No. | Hipotesis | Hasil Uji |
|-----|--|-----------|
| 1. | Besarnya asset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan <i>Board Governance</i> | Diterima |
| 2. | Umur go public perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan <i>Board Governance</i> | Diterima |
| 3. | Jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan <i>Board Governance</i> | Diterima |

4.4. Pembahasan

4.4.1. Besarnya asset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pertama yaitu besarnya asset memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* dengan hasil nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis pertama diterima. Nilai koefisien regresi adalah positif dan ini menunjukkan bahwa semakin besar asset perusahaan akan cenderung semakin tinggi perusahaan tersebut untuk semakin taat dalam menerapkan aturan *board governance*.

Hal ini disebabkan karena dengan adanya asset yang semakin besar maka perusahaan cenderung telah berskala besar sehingga akan memiliki ketaatan yang semakin besar terhadap aturan *board governance* untuk menarik investor dalam

menginvestasikan sahamnya pada perusahaan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryanah (2004) yang menyatakan bahwa besar kecilnya asset perusahaan akan berbeda dalam pengungkapan ketaatan terhadap aturan *board governance*.

4.4.2. Umur go public perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu umur go public memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* dengan hasil nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis kedua diterima. Nilai koefisien regresi adalah positif dan ini menunjukkan bahwa semakin lama umur go public perusahaan akan cenderung semakin tinggi perusahaan tersebut untuk semakin taat dalam menerapkan aturan *board governance*.

Hal ini disebabkan karena dengan semakin besarnya umur go public maka perusahaan telah memiliki pengalaman yang semakin matang dan banyak sehingga untuk menarik investor perusahaan akan semakin taat terhadap *board governance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasfer (2002) yang menyatakan bahwa umur go public perusahaan akan berbeda dalam ketaatan terhadap aturan *board governance*.

4.4.3. Jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *Board Governance*

Untuk pengujian hipotesis ketiga yaitu jenis industri memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* dengan hasil nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis ketiga diterima.

Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan jenis industri perbankan dan asuransi serta kredit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan arau jasa sehingga perusahaan tersebut akan berusaha untuk semakin taat dalam menerapkan aturan *board governance* dalam rangka menarik minat investor dalam berinvestasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryanah (2004) dan Suryanah (2006) yang menyatakan bahwa jenis industry akan mempengaruhi ketaatan terhadap aturan *board governance*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan menguji hipotesis tentang pengaruh besar asset, umur go public dan jenis industry terhadap ketaatan emitan terhadap *board governance* dengan studi empiris pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Berdasarkan pada pembahasan dan hasil analisis data pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya asset perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.
2. Umur go public mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.
3. Jenis industri mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan penelitian ini antara lain: akses data yang cukup terbatas karena fokus pada penelitian ini hanya pada periode tahun 2008 saja dan juga karena topik tentang *board governance* yang masih jarang dilakukan, sehingga tinjauan literatur untuk landasan teori dan dukungan empiris cukup sulit didapatkan.

5.3. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang lebih banyak dengan memperpanjang periode penelitian.
2. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Renee B. dan Hamid Mehran. 2003. *Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?* <http://papers.ssrn.com>.
- Andari, Fitri Rahma. 2004. Faktor Internal Pada Kecenderungan Underpricing Saham Perdana di BEJ dalam Tahun 1998-2004. *detic.com*.
- Augustine, Yvvoe dan Adele Tiara Amelida. 2005. Analisa Responsivitas Ketaatan Emiten Terhadap Aturan Board Governance pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Pada Tahun 2003. *Makalah Konferensi Nasional Akuntansi*.
- Carter, David,A., et al. 2003. *The Diversity of Corporate Board Committees and Financial Performance*. Oklahoma State University.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisa Mltivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillan, Stuart L, Jay C. Hartzell dan Laura T. Starks. 2003. *Explaining Corporate Governance: Boards, Bylaws, and Charter Provisions, Revised Draft*, August 2003. <http://papers.ssrn.com>.
- Hartzell, Jay C. and Laura T. Starks. 2003. "Institutional Investors and Executive Compensation." *The Journal of Finance*. December, 2003.
- Hastuti, Dwi Theresia. 2005. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan: Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Jakarta. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Husnan, Suad. 2001. Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan: Perbandingan Kinerja Perusahaan dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Multinasional dan bukan Multinasioanl. *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen Ekonomi* 1 (1): 1-12
- Nasution, Marihot dan Doddi Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*.

- Kakabadse dan Kouzman. 2001. *The Audit Committee: An International Perspective*.
- Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance Dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya*.
- Khomsiyah dan Rika Gelar Ayu. 2004. Hubungan Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII Bali*.
- Klapper, L. dan Innesa Love. 2002. Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets, *World Bank Policy Research*.
- Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto LS. 2005. Corporate Governance Dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting Dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Lasfer, Meziane. 2002. Board Structure and Agency Costs. City University London - Cass Business School. *Working Paper Series*.
- Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February, 1999.
- Nuryanah, Siti. 2004. Analisa Ketaatan Emiten Terhadap Aturan Board Governance: Studi Kasus Tahun 2002. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII Bali*.
- Steinberg, John dan Bromilow. 2000. *Find Audit Committee Effectiveness*. Journal e-Bay.
- Susilo, Joko. 2006. Eksplorasi Kebutuhan Stakeholders Terhadap Informasi Dalam Laporan Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 10 (1): 87-112.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Suryanah, Siti. 2006. *Analisis hubungan board governance dengan penciptaan nilai perusahaan: studi kasus perusahaan-perusahaan tercatat di BEJ*. Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Syahroza, Akhmad. 2003. Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. *Usahawan No. 06 THXXXII*.

Utama, Cyntia A. 2003. Tiga Bentuk Masalah Keagenan (agency Problem) dan Alternatif Pemecahannya. *Usahawan No. 01 THXXII*.

Utama, Siddharta dan Cyntia Afriani. Praktek Corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan: Studi Empiris di BEJ. *Usahawan No. 08 THXXXIV*.

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Annissa Fitria Farahnazl
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606017
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETAATAN EMITEN TERHADAP ATURAN BOARD
GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Oktober 2010

Tim Penguji:

1. Dr. H.Abdul Rohman, SE., Msi., Akt (.....)

2. Daljono,SE., M.Si., Akt (.....)

3. Totok Dewanto, SE., M.Si., Akt (.....)